

**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PERIKANAN**



LAPORAN KINERJA

LKj

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa RENSTRA Tahun 2018 – 2023. LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018 - 2023).

LKj Dinas Perikanan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Perikanan Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Perikanan, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perikanan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Perikanan Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Perikanan Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Perikanan pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perikanan Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 (lima) indikator kinerja utama, yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dimana kita tahu tahun 2020 adalah tahun pandemi dan ada beberapa kegiatan yang dikurangi anggarannya. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan . Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Perikanan Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sinjai, Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Sinjai,

DR. H.MUKHLIS ISMA, SE, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Perikanan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perikanan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Perikanan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Perikanan tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan Kab. Sinjai.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2020 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu : Volume produksi perikanan dengan didukung beberapa kegiatan yaitu Pengadaan Kapal penangkapan ikan, Pengadaan alat bantu penangkapan ikan, Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI), Pengadaan Saran dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Nelayan, jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Pembangunan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD) BBI.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perikanan ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perikanan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	1
Gambaran Umum Organisasi	2
Struktur Organisasi	4
Komposisi SDM Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
Rencana Strategis	10
Program untuk Pencapaian Sasaran	11
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	12
Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
Rencana Anggaran Tahun 2020	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
Capaian Kinerja Organisasi	14
Capaian Indikator Kinerja Utama 2020	15
Perbandingan Capaian Kinerja	15
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	16
Realisasi Anggaran	17
BAB IV PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perikanan Tahun 2020	3
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Golongan	6
Tabel 1.3	Komposisi Sumberdaya Pegawai menurut Bidang	7
Tabel 1.4	Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan	8
Tabel 1.5	Komposisi PNS menurut Diklat PIM tahun 2020	9
Tabel 1.6	Jumlah PNS menurut Jabatan Struktural	9
Tabel 2.1	Program untuk Pencapaian Sasaran tahun 2020	11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan tahun 2020	12
Tabel 2.3	Rencana Belanja Dinas Perikanan TA 2020	13
Tabel 2.4	Alokasi per Sasaran tahun 2020	13
Tabel 3.2	Tabel Pencapaian Indikator tahun 2020	15
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian 2020 dan Target RENSTRA	14
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian pada Sasaran 1	16
Tabel 3.5	Rencana dan Realisasi Capaian pada Sasaran 2	17
Tabel 3.6	Realisasi Capaian Anggaran kegiatan tahun 2020	18
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Perikanan Sinjai	5
Gambar 2	Komposisi Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Sinjai	6
Gambar 3	Jumlah PNS berdasarkan Bidang dan UPTD	7
Gambar 4	Persentase PNS menurut Jenjang Pendidikan	8
Gambar 5	Perimbangan PNS & Jenis Kelamin menurut Jenjang Pendidikan	8

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perikanan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Perikanan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perikanan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perikanan

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka bagian Sekretariat mempunyai fungsi: 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas; 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan; 3) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; 4) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian dan; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi Budidaya, Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan, Sarana dan prasarana budidaya. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Pelaksanaan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas ; 2) Perumusan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya , Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan dan Sarana dan prasarana budidaya.; 3) Pelaksanaan pengembangan dan pengendalian perikanan budidaya : 4) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan budidaya, pengendalian dan kesehatan lingkungan, budidaya; 5) pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

Bidang Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan sebagian tugas dinas, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan yang meliputi seksi Pengembangan Sumberdaya manusia, Bina Usaha Teknologi, Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan, maka Bidang pengelolaan perikanan Tangkap melaksanakan fungsi : 1) perumusan rencana kegiatan dibidang tugasnya sesuai rencana dan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; 2) Pembinaan Pengembangan sumberdaya manusia; 3) Kegiatan bina usaha dan teknologi; 4) Menyusun rencana kegiatan pengembangan sumberdaya manusia; 5) Menyusun SOP ; 6) Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan; 7) Menyusun rencana kelembagaan dan penyuluhan; dan 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Lappa dan Tempat Pelelangan Ikan Pembantu Tongke-Tongke. Dalam melaksanakan tugas dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pelayanan di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan; 2) menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan tempat pelelangan ikan; 3) mengawasi dan mengendalikan pengelolaan tempat pelelangan ikan; 4) memberikan pelayanan umum di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan; 5) melaksanakan kegiatan ketatausahaan UPT; dan 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Tassililu dan Balai Benih Ikan (BBI) Palangka Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan benih ikan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Membantu menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Balai Benih Ikan 2). Pembinaan dan Pengawasan Internal 3) Monitoring dan evaluasi kegiatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan, 4) Menyusun rencana anggaran untuk kegiatan UPTD, 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan beberapa indikator kinerja baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perikanan Tahun 2020

No	Rincian	Target
1.	Volume Produksi Perikanan (Ton)	82.047
2.	Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	17,45
3.	Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita	47
4.	Produksi Perikanan kelompok nelayan (%)	22,41
5.	Jumlah Produk Hasil olahan	1.478

Adapun indikator sasaran dalam pelayanan merupakan bagian dari indikator kinerja utama dengan fokus kepada arahan teknis dan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi dinas yang terdiri dari atas 3 bidang teknis, 1 bidang sekretariat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN

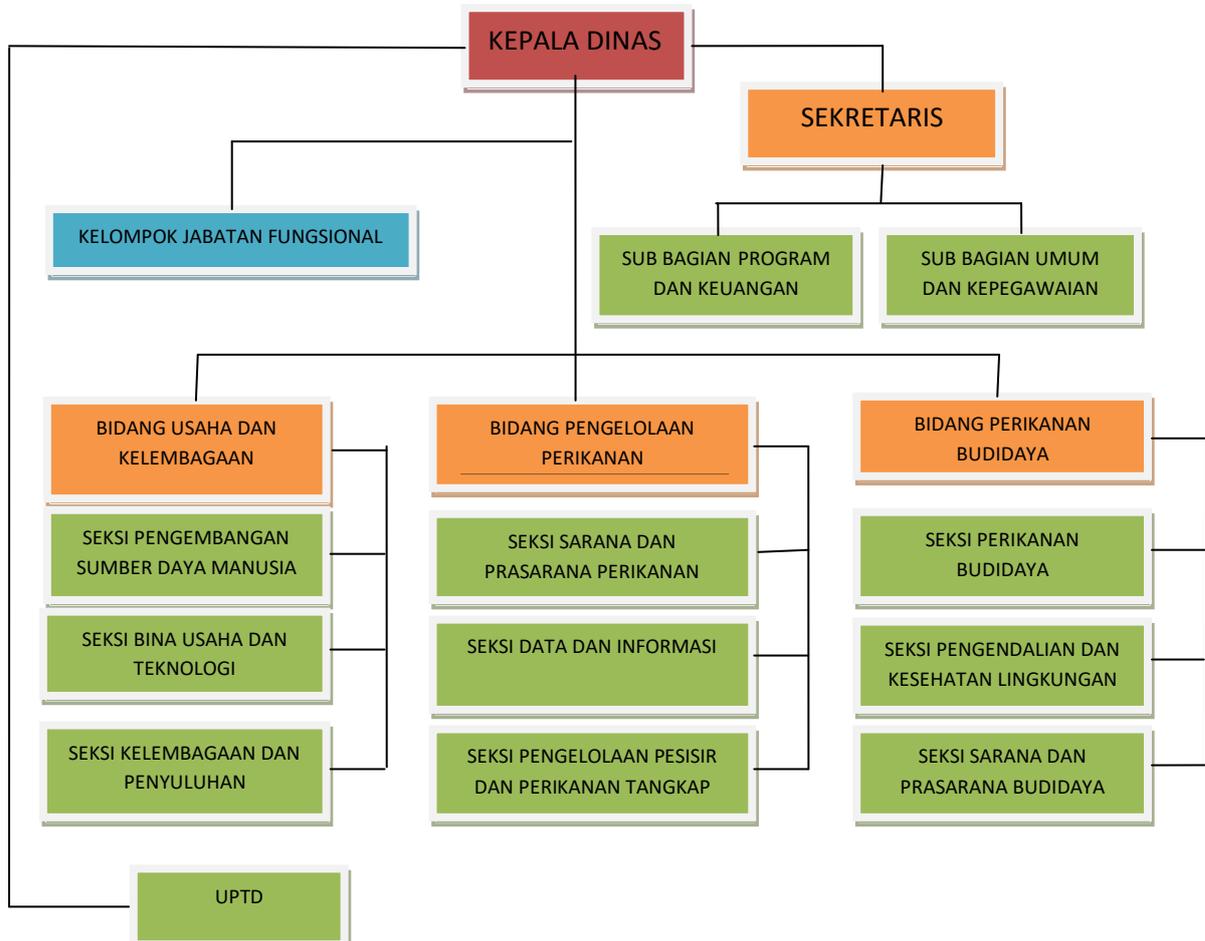
Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 3) Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
 - a. Seksi Budidaya
 - b. Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
- 4) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 - b. Seksi Data dan Informasi
 - c. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap
- 5) Bidang Usaha dan Kelembagaan membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Seksi Bina Usaha dan Teknologi
 - c. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
- 6) Unit Pelaksana Teknis Daerah membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. BBI Dinas Perikanan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Sturuktur Organisasi Dinas Perikanan Kab. Sinjai seperti terlihat berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI

Perda Kabupaten Sinjai
Nomor : 5 Tahun 2016
Tanggal : 29 Nopember 2016



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab. Sinjai

KOMPOSISI SDM ORGANISASI

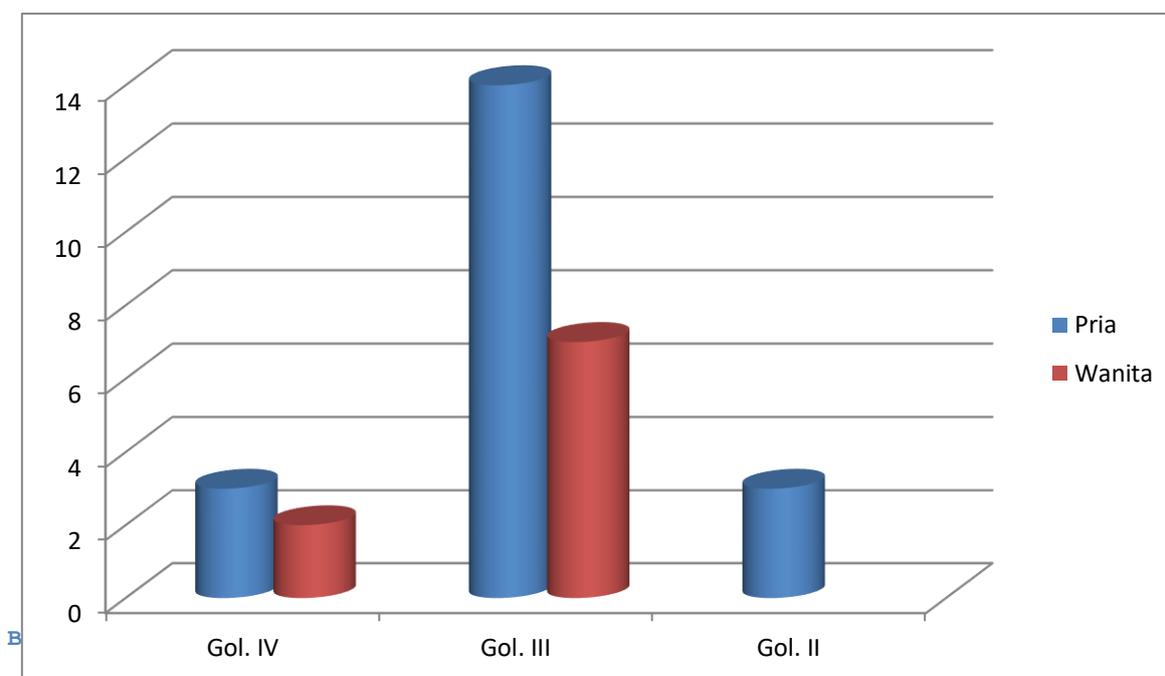
Dinas Perikanan Kab. Sinjai pada awal tahun 2020 memiliki jumlah pegawai sebanyak 31 orang, sampai pada akhir tahun 2020 jumlah pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sebanyak 31 orang dengan perincian : 13 orang merupakan pejabat struktural dan 15 orang merupakan fungsional umum.

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Pegawai Dinas Perikanan memiliki jumlah pegawai laki-laki sebanyak 21 orang dan pegawai perempuan sebanyak 10 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel.1.2 Komposisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Golongan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Golongan IV/c	1	-	1
2	Golongan IV/b	2	-	2
3	Golongan IV/a	1	2	3
4	Golongan III/d	7	3	10
5	Golongan III/c	4	4	8
6	Golongan III/b	3		3
7	Golongan III/a	-	-	-
8	Golongan II/d	1	-	1
9	Golongan II/c	1	1	2
10	Golongan II/b	-	-	-
11	Golongan II/a	1	-	1
Jumlah		21	10	31

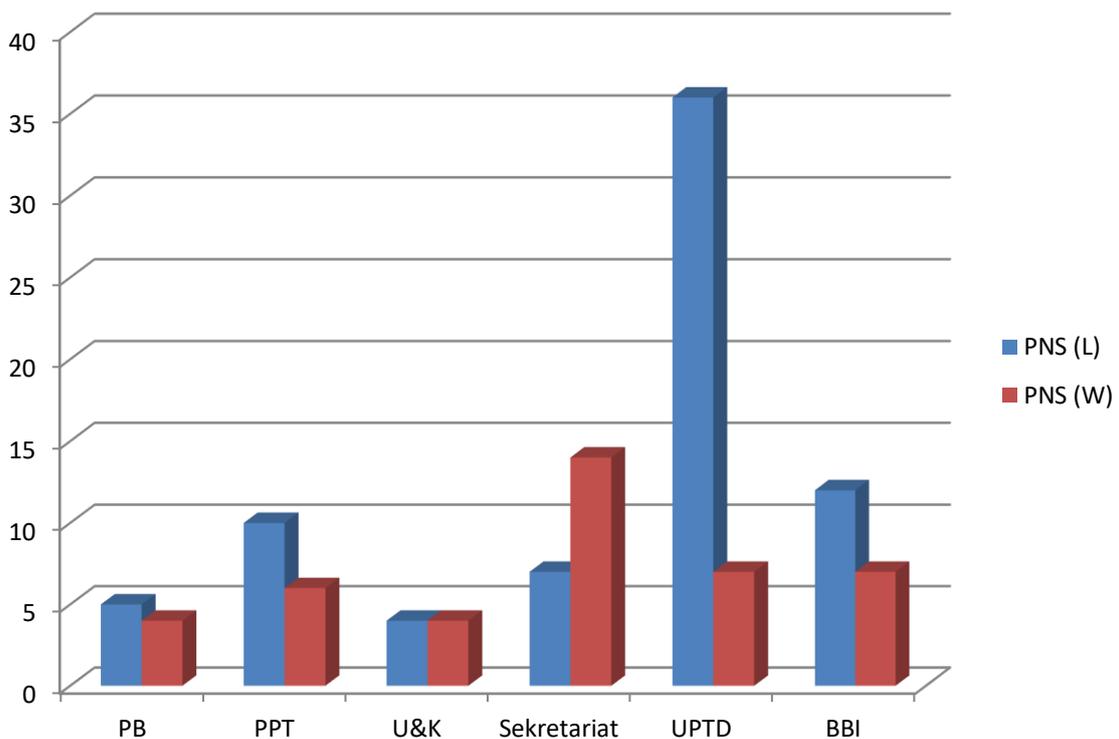


Gambar 2. Komposisi Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kab. Sinjai

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai terdiri atas Sekretariat , 3 bidang, dan 2 UPTD . Pada unit tersebut telah terdistribusi pegawai dengan jumlah sumberdaya kepegawaian sebagai berikut :

Tabel. 1.3 Komposisi Sumberdaya Pegawai menurut Bidang

No	Bidang/Unit	PNS		Jumlah	Kontrak		Jumlah
		Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1	Perikanan Budidaya	3	2	5	2	2	4
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	4	1	5	5	5	10
3	Usaha dan Kelembagaan	5	1	6	1	3	4
4	Sekretariat	4	4	8	4	10	14
5	UPTD TPI	4	-	4	32	7	39
6	BBI Palangka	-	1	1	5	3	8
7	BBI Tassililu	2	-	2	5	3	8
	Jumlah	22	10	31	54	33	87



Gambar 3. Jumlah PNS berdasarkan Bidang dan UPTD Dinas Perikanan Sinjai

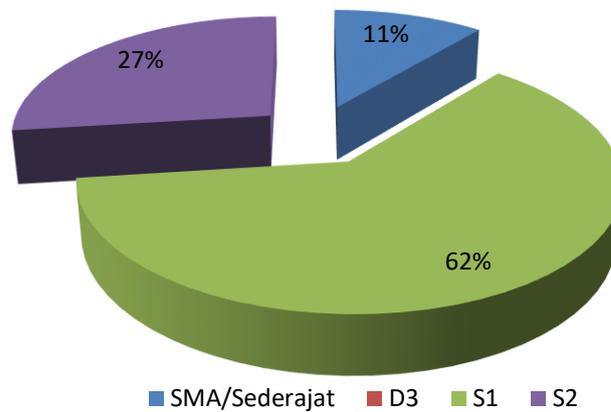
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 tercatat sebanyak 29 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Magister Sains (S2) sebagai berikut :

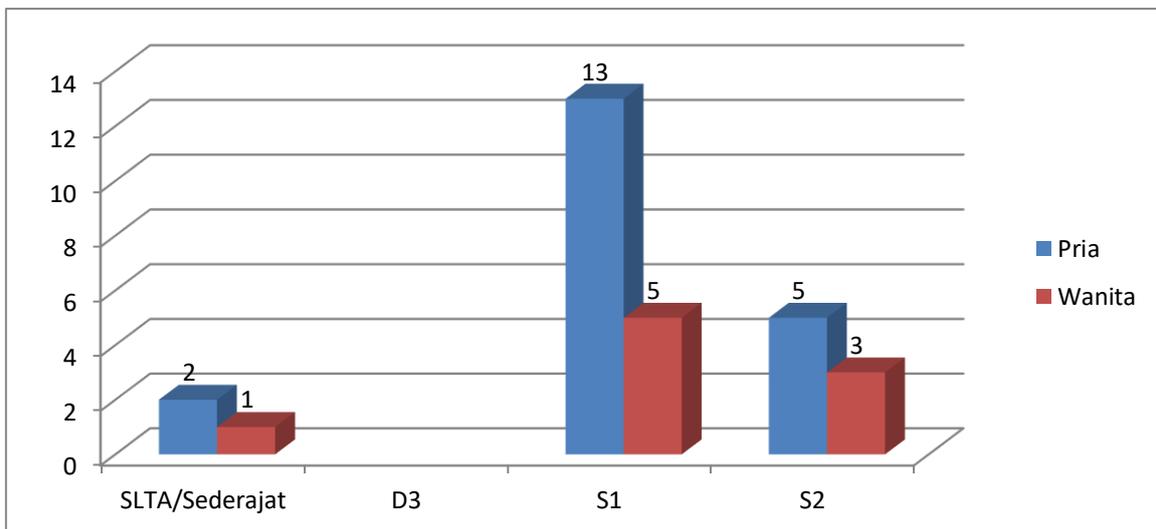
Tabel 1.4 Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S2	7	3	10
2	S1	13	5	18
3	Sarjana Muda	-	-	-
4	SLTA	2	1	3
	Jumlah	20	9	29

Persentase Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan



Gambar 4 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan



Gambar 5 Perimbangan PNS Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2019

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Tingkat penjurangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sejak tahun 2020 sebanyak 17 orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II sebagai berikut :

Tabel 1.5 Komposisi PNS menurut Diklat PIM Tahun 2020

No	Diklat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Diklat PIM II	1	-	1
2	Diklat PIM III	-	2	3
3	Diklat PIM IV	7	3	10
	Jumlah	8	5	13

Tabel 1.6 Jumlah PNS menurut Jabatan Struktural

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	7	4	11
	Jumlah	9	6	15

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan Kabupaten

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis SKPD Dinas Perikanan untuk periode 5 tahun. Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai membuat dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas Perikanan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Perikanan telah membuat Perjanjian Kinerja sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, dan mengikuti tahapan pengalokasian dana.

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	
	a.Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,-
	b.Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.055.000,-
	c.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.246.000,-
	d.Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang undangan	1.700.000,-
	e. Pelayanan administrasi kesekretariatan	114.798.525,-
	f.Pengelolaan Keuangan SKPD	39.075.000,-
	g.Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	107.687.900,-
	h.Pengadaan peralatan gedung kantor	47.100.000,-
	i.Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	34.233.000,-
	j.Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	3.200.000,-
	k.Bimtek implementasi peraturan dan iktisar realisasi kinerja	6.645.200,-
II	Program Pelaporan Kinerja	
	a.Penusunan Laporan Capain Kinerja	6.479.600,-
	b.Penyusunan Dokumen Perencanaan	23.905.000,-
III	Program Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	
	a.Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan < 3 GT	307.472.025,-
	b.Pengadaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan	356.999.975,-

	e. Operasional Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	149.262.500,-
	f. Penyusunan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	10.560.000,-
IV.	Program Pengelolaan Budidaya Perikanan	
	a. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI)	60.400.000,-
	e. Pengadaan Sarana dan Prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan	826.000.000,-
	f. Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit pembenihan (UPTD) BBI	447.775.000,-
	f. Monitoring Kualitas air dan penyakit ikan	6.500.000,-
V.	Program Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Produk Perikanan	
	a. Pameran dan Promosi Kelautan dan Perikanan	10.000.000,-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Dinas Perikanan telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capain Kinerja
Meningkatnya produksi komoditi perikanan	Volume produksi perikanan	Ton	83.045,71
	Produksi perikanan kelompok Nelayan	%	22,41
	Jumlah produk olahan hasil perikanan	Ton	1.476
Meningkatnya konsumsi ikan	Jumlah konsumsi ikan per kapita	Kg/kap/thn	47
Peningkatan persentase pembinaan kelompok nelayan	Cakupan bina kelompok nelayan	%	17,45

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 5.672.608.010,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Rencana Belanja Dinas Perikanan TA 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.043.513.285,00,-	53,65
2	Belanja Langsung	2.629.094.725,00,-	46,35
Jumlah		5.672.608.010,00,-	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
1.	Meningkatnya produksi komoditi perikanan tangkap Pesisir dan pulau pulau kecil	Volume Produksi Perikanan	824.294.500,00,-	98,60
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		1.340.675.000,00,-	99,89
3.	Meningkatnya pengelolaan hasil dan pemasaran produk perikanan		10.000.000,00,-	100
TOTAL				99

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 2.629.094.725,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan serta pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengembangan budidaya perikanan dengan besaran 99.50 %. Dan untuk realisasi kinerja 100 %.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
Meningktanya produksi komoditi perikanan	Volume produksi perikanan	Ton	82,047	83.045,71	101,22
	Produksi perikanan kelompok Nelayan	%	22,41	22,41	100
	Jumlah produk olahan hasil perikanan	Ton	1.476	1.476	100
Meningkatnya komsumsi ikan	Jumlah konsumsi ikan per kapita	Kg/kap/thn	47	47	100

Peningkatan persentase pembinaan kelompok nelayan	Cakupan bina kelompok nelayan	%	17,45	17,45	100
---	-------------------------------	---	-------	-------	-----

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2020

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perikanan untuk tahun 2020. Pencapaian Indikator tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capain Kinerja	
		2019	2020
1	Volume produksi perikanan (Ton)	79.803,6	83.045,71
2	Konsumsi Ikan perkapita (kg/Kap.Thn)	21,98	22,41
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	1.488	1.476
4	Produksi Perikana kelompok nelayan (%)	47	47
5	Jumlah produk hasil olahan perikanan (Ton)	17,11	17,45

Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan pada tahun 2020, 5 (lima) indikator menunjukkan capaian 100% dan ada lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. IKU Dinas Perikanan yang tingkat pencapaiannya sudah mencapai 100 % pada tahun 2020, namun masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target jangka menengah	Rata rata realisasi sampai dengan tahun tahun ini	Capaian (%)
1.	Volume produksi perikanan	Ton	82,047	83.045,71	101,22
2.	Jumlah konsumsi ikan per kapita	Kg/Kap/Thn.	22,41	22,41	100
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	1.476	1.476	100
4.	Produksi perikanan kelompok Nelayan	%	47	47	100
5.	Jumlah produk olahan hasil perikanan	Ton	17,45	17,45	100

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 Meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan

Sasaran 1 merupakan sasaran yang bertujuan meningkatkan volume produksi perikanan dengan indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya, produksi perikanan kelompok nelayan dan jumlah produksi olahan hasil perikanan.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian pada Sasaran 1

No	Indikator	2020			Target akhir Renstra
		Target	Realisasi	%	
1.	Volume produksi perikanan	82,047	83.045,71	101,22	92.074
2.	Produksi perikanan kelompok nelayan	22,41	22,41	100	23,78
3.	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	1.476	1.476	100	1.565

Untuk tahun 2020, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **Sangat Tinggi**, Capaian dan sesuai dengan target akhir Renstra 2020. Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh 1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dengan kegiatan yaitu Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan dan pembudidaya), Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI), Pengembangan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit pembenihan, Pengendalian hama dan penyakit ikan ,

2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan yaitu Pengadaan kapal penangkap ikan, Pengadaan alat penangkapan ikan: Permasalahan yang timbul terhadap pencapaian sasaran adalah kurangnya anggaran dan sumberdaya yang tersedia
Solusi: Solusi terhadap permasalahan yaitu dengan memberikan prioritas pada program dan kegiatan prioritas serta mengoptimalkan terhadap sumberdaya yang tersedia

➤ **Sasaran 2 Meningkatkan Komsumsi Ikan**

Sasaran 2 merupakan sasaran dalam rangka peningkatan jumlah masyarakat yang mengkonsumsi ikan setiap tahunnya.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2

No	Indikator	2020			Target akhir renstra
		Target	Realisasi	%	
1.	Jumlah Komsumsi ikan perkapita	47	47	100	48

Pada sasaran 2 ini hasil yang dicapai sesuai dengan yang ditergetkan .

➤ **Sasaran 3 Peningkatan Presentase Pembinaan Kelompok Nelayan**

Sasaran 3 merupakan sasaran dalam rangka peningkatan presentase pembinaan terhadap kelompok nelayan yang menjadi binaan dinas perikanan setiap tahunnya.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Indikator	2020			Target akhir renstra
		Target	Realisasi	%	
1.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	17,45	17,45	100	18,50

REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 98,19% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan produksi komoditi perikanan (98,34%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2020 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran rendah. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih sudah seimbang dengan realisasi kinerjanya.

Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya efisiensi anggaran kecil .

Tabel 3.6 Realisasi anggaran kegiatan tahun 2020

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3		
I.	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran.			
	a.Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,-	51,664.769,-	86,11
	b.Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.055.000,-	7.055.000,-	100
	c.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.246.000,-	2.246.000,-	100
	d.Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang undangan	1.700.000,-	1.690.000,-	99,41
	e. Pelayanan adminstrasi kesekretariatan	114.798.525,-	14.797.925,-	100
	f.Pengelolaan Keuangan SKPD	39.075.000,-	39.075.000,-	100
	g.Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	107.687.900,-	107.572.605,-	99,89
	h.Pengadaan peralatan gedung kantor	47.100.000,-	46.920.500,-	99,62
	i.Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	34.233.000,-	34.127.362,-	99,69
	j.Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	3.200.000,-	3.200.000,-	100
	k.Bimtek implementasi peraturan dan ihtisar realisasi kinerja	6.645.200,-	6.645.200,-	100
II	Program Pelaporan Kinerja			
	a.Penusunan Laporan Capain Kinerja	6.479.600,-	6.479.600,-	100
	b.Penyusunan Dokumen Perencanaan	23.905.000,-	23.889.200,-	99,93

III	Program Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil			
	a.Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan < 3 GT	307.472.025,-	302.692.860,-	98,45
	b.Pengadaan alat bantu penangkapan ikan	356.999.975,-	352.000.000,-	98,60
	e. Operasional Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	149.262.500,-	149.262.450,-	100
	f.Penyusuna Data Statistik Kelautan dan Perikanan	10.560.000,-	10.560.000,-	100
IV	Program Pengelolaan Budidaya Perikanan			
	a.Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI)	60.400.000,-	60.400.000,-	100
	e.Pengadaan Sarana dan Prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan	826.000.000,-	825.067.100,-	99,89
	f. Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit pembenihan (UPTD) BBI	447.775.000,-	441.645.717,-	98,63
	f. Monitoring Kualitas air dan penyakit ikan	6.500.000,-	6.500.000,-	100
V	Program Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Produk Perikanan			
	a.Pameran dan Promosi Kelautan dan Perikanan	10.000.000,-	10.000.000,-	100

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa (tiga) sasaran, menunjukkan pencapaian 100%.

Dari tiga sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Perikanan	Volume produksi perikanan (ton)	101	99,23	ST
		Produksi perikanan kelompok Nelayan	100		
		Jumlah produk olahan hasil perikanan	100		
2	Meningkatnya konsumsi ikan	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	100		
2	Peningkatan persentase pembinaan kelompok nelayan	Jumlah produk olahan hasil perikanan (Ton)	100		

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Organisasi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Perikanan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2020 adalah sangat baik, karena terdapat 5 (Lima) indikator memenuhi kriteria tinggi .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perikanan ke depan. Beberapa hal yang menjadi tantangan ke depan adalah peningkatan tingkat partisipasi masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya ikan dalam menunjang pembangunan dan perbaikan kesejahteraan mereka. Pengurangan tingkat kemiskinan dapat dilakukan dengan tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Perikanan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Perikanan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Lampiran 1

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja		
			Target	Realisasi	%
1.	Meningktanya produksi komoditi perikanan	Volume produksi perikanan			
		Produksi perikanan kelompok Nelayan	82,047	83.045,71	101,22
		Jumlah produk olahan hasil perikanan	22,41	22,41	100
2.	Meningkatnya komsumsi ikan	Jumlah konsumsi ikan per kapita	1.476	1.476	100
3.	Peningkatan peresentase pembinaan kelompok nelayan	Cakupan bina kelompok nelayan	47	47	100